



## **PENDIDIKAN KEMANDIRIAN BERBASIS GENDER**

*(Nilai Pendidikan Pesantren di Indonesia)*

**Aziza Meria**

### ***Abstract***

*Independence is one of the goals of education. The value of independence should be inculcated for of human being for independence grow is the most appropriate educational institution. Boarding school separates male and female students, independence education is easy to do. Dynamics of more boarding school is not just a process of education and teaching cognitive, but the emphasis on individual learning and community life, the formation of character, personality, mental and social development in the community. Independent education based on genderis one of the values and behavior should be had male and female students, to mate the survival.*

***Key words:*** *independence education, gender and boarding*

### **A. Pendahuluan**

Zakiah Darajat (1976: 130) memaknai kemandirian jika dikaitkan dengan anak, sebagai kecenderungan anak untuk melakukan sesuatu yang diingini tanpa minta tolong kepada orang lain. Juga mengukur kemampuannya untuk mengarahkan kelakuannya tanpa tunduk kepada orang lain. Sedangkan Nana Sudjana (1999: 167) menyebut kemandirian adalah kemampuan anak untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara pribadi tanpa ketergantungan dengan orang lain.

Apabila ditinjau dari segi pendidikan, kemandirian merupakan salah satu tujuan pendidikan yang diharapkan kepada peserta didik. Tertuang dari tujuan pendidikan nasional bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (UU SISDIKNAS, 2010: 6) begitu juga dalam pendidikan Islam, Ramayulis (2008: 134-136) tujuan pendidikan Islam tertinggi adalah untuk menjadi hamba Allah, khalifah di muka bumi, dan memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, secara individu maupun masyarakat. Bila dilihat dari tujuan di atas, maka kemandirian serta pembentukan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia yang mandiri sangat urgen untuk dilakukan.

Di Indonesia, pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang tertua yang jauh sebelumnya telah menekankan nilai-nilai kemandirian dalam semua aspek pendidikannya. Kemandirian tersebut tercermin dari proses pendidikan lembaga, penyediaan sarana prasarana, pendanaan pendidikan, manajemen kurikulum, proses pengajaran, dan yang terpenting adalah pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik atau santrinya. Nilai kemandirian bahkan menjadi motto dan jiwa bagi para santri. Terlihat dari sistem asrama, proses pengembangan mental, kegiatan pengajaran, serta memenuhi kebutuhan dan mengatur diri dilakukan secara mandiri.

## **B. Kemandirian dan Pendidikan Kemandirian**

Kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain (Pusat Bahasa, 1994: 642). Hans Wehr (1974: 642) menyebut kemandirian sebagai *al-i'timad 'ala an-nafs* (mengandalkan diri sendiri) atau *self-confidence* (kepercayaan pada diri sendiri), *self reliance*. Paul T. Mero menyebut kemandirian dengan *self-reliance*, sinonim dari *self sufficiency*, yang berarti "mengerjakan sesuatu untuk diri sendiri, dari pada menunggu bantuan orang lain". Hal ini tidak berarti bahwa kita" tidak membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupan. Kemandirian merupakan sikap hidup secara independen dan bebas terhadap orang lain dalam masyarakat.

Kemandirian merupakan bentuk kemerdekaan ([www.american-heritage.org/pdf7Self-Reliance.pdf](http://www.american-heritage.org/pdf7Self-Reliance.pdf), diakses 22 Januari 2013).

Istilah mandiri biasa digunakan dalam kajian psikologi. Erost (1998: 17) mendefinisikannya sebagai sikap jiwa yang menjadikan manusia tahu apa yang dilakukannya karena sadar dengan apa yang dituju. Perilaku seseorang yang berjiwa mandiri senantiasa dituntun oleh apa yang menjadi tujuan hidupnya. Smart and Smart (1976: 73) mendefinisikan kemandirian sebagai sikap jiwa yang aktif dan penuh inisiatif ketika berhadapan dengan problem tertentu dengan upayanya sendiri tanpa mencari pertolongan dan dukungan orang lain. Sedangkan Habib Thoha (1996: 122) menyebut perilaku mandiri sebagai kebebasan dari pengaruh orang lain.

Berbagai definisi tentang kemandirian memberikan gambaran tentang ciri-ciri sebuah sikap kemandirian. Di antara ciri-ciri kemandirian tersebut adalah (1) Memahami tujuan, (2) Motivasi, (3) Mengevaluasi diri, (4) Mampu berpikir secara kritis dan inovatif, (5) Tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, (6) Tidak lari atau menghindari masalah, (7) Memecahkan masalah dengan berfikir yang mendalam, (8) Tanggung jawab, (9) Apabila menjumpai masalah dipecahkan sendiri tanpa meminta bantuan orang lain, (10) Tidak harus rendah diri apabila berbeda dengan orang lain, (11) Berusaha bekerja dengan penuh ketekunan dan kedisiplinan, (12) Bertanggung jawab atas tindakannya sendiri (Mundzir, 2006: 36).

Berdasarkan ciri-ciri kemandirian di atas, apabila diharapkan hal tersebut akan terbentuk pada peserta didik, membutuhkan usaha dan kerja keras dari semua pihak. Terutama lembaga pendidikan, masing-masing lembaga pendidikan di Indonesia harus membuat semua aspek pendidikannya mengacu pada pembentukan kemandirian peserta didik, seperti proses pembelajaran, bimbingan terhadap peserta didik, kurikulum, kegiatan ekstra sekolah dan sebagainya, pendidikan kemandirian ada yang menyamakan dengan kemandirian pendidikan atau otonomi pendidikan. Kemandirian pendidikan lebih menekankan pada manajemen berbasis sekolah atau *based management school*, sedangkan pendidikan kemandirian merupakan nilai-nilai yang harus

ditanamkan dan terdapat pada semua aspek penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

Kemandirian pendidikan gagal karena tidak adanya nilai-nilai pendidikan kemandirian pada sebuah lembaga pendidikan. Lanjut Sidi (2001) dipengaruhi tuntutan peningkatan mutu disebabkan pendidikan sekolah belum memberikan hasil yang memuaskan. Hal tersebut dikarenakan (1) Rendahnya akuntabilitas sekolah kepada masyarakat, (2) Tidak optimalnya penggunaan sumber daya di sekolah, (3) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan, (4) Dan lambatnya sekolah dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan (Fahrurrozi & Mahyudin, 2010: 206).

Berdasarkan sebab di atas, apabila diambil benang merah sebab musababnya adalah karena tidak adanya nilai kemandirian pada sekolah. Sekolah masih mengharapkan masyarakat berpartisipasi pada kelangsungan lembaga, sekolah tidak memaksimalkan potensi yang ada, dan kurang pandainya sekolah menyesuaikan diri dengan masyarakat. Padahal sebuah lembaga pendidikan harus mampu menjalin komunikasi, berinteraksi, bersosialisasi dan mengakomodir keinginan masyarakat sesuai dengan tujuan lembaga dan budaya sosial di sekitarnya.

Ada beberapa manajemen lembaga pendidikan yang harus dikelola dengan kemandirian di antaranya manajemen kurikulum, sarana prasarana, sumber daya manusia atau personel, pembiayaan, dan yang paling penting adalah manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan dilakukan agar tujuan pendidikan yang paling utama yang bertumpu pada pengembangan potensi peserta didik dapat tercapai secara maksimal.

Siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu *input* yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Manajemen kesiswaan meliputi penerimaan siswa baru, layanan bimbingan dan penyuluhan, pengelolaan siswa di dalam kelas, pengelolaan organisasi siswa intra sekolah, pengelolaan data tentang siswa, pembinaan kepribadian dan

karakter siswa agar ia mampu hidup di tengah-tengah masyarakat setelah dia tamat sekolah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa semua kegiatan di sekolah pada akhirnya ditujukan untuk membantu siswa mengembangkan potensi dirinya. Menurut Hasbullah (2006: 121) upaya tersebut dapat optimal jika siswa sendiri secara aktif dan mandiri berusaha mengembangkan diri sesuai dengan program-program yang dirancang oleh sekolah. Karenanya menjadi penting untuk menciptakan lingkungan kondusif yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan diri secara optimal. Kepala sekolah sebagai *top leader* di sekolah, memegang peranan penting dalam mewujudkan kondisi tersebut.

Beberapa prinsip dasar berkenaan dengan manajemen kesiswaan lanjut Hasbullah (2006: 121) adalah:

- 1) Siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk mandiri dan berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka.
- 2) Keadaan dan kondisi siswa sangat beragam ditinjau dari kondisi fisik, jenis kelamin, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan kegiatan yang beragam sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal.
- 3) Pada dasarnya setiap siswa hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan dan sesuai dengan perkembangan jiwanya.
- 4) Pengembangan potensi tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi secara utuh juga mencakup ranah afektif dan psikomotorik.

Berdasarkan uraian di atas, kemandirian pada pendidikan dengan segala aspeknya, mutlak dilakukan dan ditanamkan khususnya pada peserta didik. Sekolah harus mampu menjadi wadah dan wahana dalam menciptakan peserta didik yang mandiri secara intelektual, emosional, sikap, dan perbuatan, sesuai dengan peran mereka dimasyarakat, budaya, dan sosial. Apabila peserta didik memiliki sifat dan kepribadian yang

mandiri diharapkan mereka nantinya akan menjadi manusia yang mampu berperan aktif di tengah-tengah masyarakat.

### **C. Nilai-nilai Pesantren di Indonesia**

Pondok pesantren, jika dilihat dari susunan katanya merupakan gabungan dari kata pondok dan pesantren. Kata pondok, dimungkinkan berasal dari bahasa Arab *funduq*, yang berarti rumah penginapan ataupun hotel<sup>16</sup>. *Kamus Bahasa Indonesia* yang diterbitkan Pusat Bahasa Depdiknas (2008: 1203), mengartikan pondok dengan "tempat tinggal, rumah, bangunan yang berpetak-petak, atau madrasah/asrama tempat belajar agama dan mengaji".

Istilah pesantren dalam lingkup Indonesia lebih mirip dengan pemondokan dalam lingkungan padepokan, berupa perumahan sederhana yang dipetak-petak dalam bentuk kamar-kamar yang merupakan asrama bagi santri (Dhofier, 1982: 82; Patoni, 2007: 89). Nasir (2005: 80) menyebutkan bahwa secara etimologis, istilah pesantren berasal dari pe-santri-an yang berarti tempat santri. Santri atau murid mempelajari agama dari seorang Kiai atau Syaikh di pondok pesantren.

Ada beberapa istilah lain yang ditemukan dan sering digunakan untuk menunjuk jenis pendidikan Islam tradisional khas Indonesia atau yang lebih terkenal dengan sebutan pesantren. Istilah Pondok atau pesantren secara umum dipergunakan di Jawa termasuk Sunda dan Madura, di Aceh dikenal dengan istilah *dayah* atau *rangkung* atau *meunasah*, sedangkan di Minangkabau disebut *surau*.

Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai asal muasal pesantren, dalam pemakaian sehari-hari, istilah pondok pesantren bisa disebut dengan pondok atau pesantren saja, atau bahkan digabung keduanya. Secara esensial menurut Qomar (2006: 1), kedua istilah ini mengandung makna yang sama, kecuali bahwa asrama yang menjadi penginapan santri sehari-hari dapat dianggap sebagai pembeda antara pondok dan pesantren. Pada pesantren tidak disediakan asrama (pemondokan) di kompleknya sebagaimana halnya di pondok.

Perbedaan tersebut dalam perkembangannya mengalami kekaburan baik dalam fungsi pemondokan (asrama) di lembaga pondok maupun pesantren dikarenakan penggunaan istilah di masyarakat secara acak antara pondok dan pesantren. Hanya saja, penggunaan gabungan dari kedua istilah secara integral yakni "pondok pesantren" lebih mengakomodasikan karakter utuh keduanya.

Sedangkan Abdurrahman Mas'od (2002) menyatakan bahwa *"the word pesantren stems from "santri" which means one who seeks Islamic knowledge. Usually the word pesantren refers to a place where the santri devotes most of his or her time to live in and acquire knowledge"*. Kata pesantren berasal dari "santri" yang berarti orang yang mencari pengetahuan Islam, yang pada umumnya kata pesantren mengacu pada suatu tempat, di mana santri menghabiskan kebanyakan dari waktunya untuk tinggal dan memperoleh pengetahuan.

Asrama atau pondok merupakan penginapan santri dan tempat mengulang kembali pelajaran yang telah disampaikan kiai atau ustadz. Menurut Qomar (2006: 21), sampai di sini seolah-olah asrama identik dengan pondok. Terlepas dari kesimpulan Zuhri, dalam pesantren yang menganut sistem *boarding school*, keberadaan asrama merupakan sebuah keharusan. Pendidikan yang diselenggarakan sepanjang hari dan malam, hanya dapat dilaksanakan jika santri tinggal di asrama. Kegiatan kepengasuhan santri dan pendidikannya secara integral dan terencana dilaksanakan mulai santri bangun tidur hingga mereka tidur kembali. Keberadaan asrama menurut Syukri Zarkasyi (2005a: 70) juga dimaksudkan sebagai sarana mengembangkan kemandirian dan keterampilan hidup, agar mereka siap hidup mandiri setamat dari pesantren. Selain itu, di dalam pendidikan asrama terdapat pula unsur pembentukan mental dan perilaku melalui serangkaian nilai yang dijunjung dan dikembangkan bersama.

Madjid (2010: 5) dalam bahasa lain menyebut nilai menentukan sikap dalam mengantisipasi dan memecahkan setiap persoalan yang dihadapi. Nilai yang dipegangi merupakan salah satu faktor yang membentuk faktor kemandirian seseorang atau masyarakat di samping faktor psikologis, ekonomi, sosial, dan politik. Dalam tinjauan hubungan



*sibernetik* antara nilai-nilai kultural (keagamaan) dan tindakan, nilai-nilai berfungsi sebagai pengontrol dan pengawas terhadap tindakan, baik pribadi maupun kelompok.

Pesantren merupakan sebuah organisasi pendidikan dan dakwah yang hadir mengusung aktivitasnya berdasarkan sejumlah nilai. Tidak berlebihan jika fungsi pesantren sebagaimana dirumuskan Ditjen Kelembagaan Agama Islam (2004: 8) adalah (1) sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transformasi ilmu pengetahuan agama Islam dan nilai-nilai ke-Islaman (*Islamic values*); (2) sebagai lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial (*social control*); dan (3) sebagai lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Ma'sum (dalam Qomar, 2005: 23) dengan bahasa yang lebih sederhana, menyebut fungsi utama pesantren sebagai fungsi religius (*dhniyah*), fungsi sosial (*ijtima'iyah*), dan fungsi pendidikan (*tarbawiyah*), dan fungsi membentuk kepribadian, seperti bertanggung jawab, amanah, berani, mandiri, dan sebagainya.

Secara umum, nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan tradisional di pesantren sebagaimana disimpulkan oleh Mukti Ali (1987: 5) dan Alamsyah Ratu Prawiranegara adalah (1) Kehidupan Islami, (2) Keakraban hubungan antara kiai dan santri, (3) Ketaatan dan kepatuhan pada kiai atau guru, (4) Kebersamaan, kerukunan dan gotong royong, (5) Hidup sederhana, (6) Kemandirian atau independensi, (7) Kedisiplinan, dan (8) Berani menderita untuk mencapai tujuan. Sedangkan Ginandjar Kartasasmita (1996) menyebut nilai-nilai kepesantrenan berupa (1) Nilai keagamaan (religiusitas), (2) Tradisi keilmuan, (3) Semangat kewirausahaan, (4) Etos kerja, (5) Sikap kemandirian, (6) Wawasan kebangsaan, (7) Solidaritas sosial.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai nilai-nilai yang terdapat di pesantren tentang pendidikan, pengajaran, dan bimbingan terhadap santri, kemandirian merupakan sesuatu hal yang wajib ada. Disimpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam Indonesia yaitu pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki konsep kemandirian

pendidikan sekaligus memiliki nilai-nilai kemandirian dalam semua aspek pendidikannya.

#### **D. Implementasi Gender dalam Pesantren**

Sebagian besar pesantren di Indonesia, dalam system pendidikannya mengadopsi sistem pendidikan di negara Islam lainnya, yaitu memisahkan pendidikan berdasarkan jenis kelamin. Oleh sebab itu dikenal istilah pondok pesantren putra dan pondok pesantren putri, atau *kulliyatul al mu'allimiin* atau *kulliyatu al mua'llimaat*. Oleh sebab itu pola pendidikan, pengajaran, interaksi, komunikasi pada masing-masing pesantren menyesuaikan dengan jenis pesantren mereka. Penyesuaian tersebut tidak bersifat kaku dan monoton. Seperti pada pesantren yang memiliki santri pria, mereka tetap diberikan pendidikan pengajaran, bimbingan, dan aplikasi kemasyarakatan dalam konteks *feminim*, seperti belajar memasak, mengelola belanja dan keuangan sendiri, menyapu, membersihkan rumah, pendidikan berkelurga, segala bentuk seni seperti musik, tari, peran, lukis, kaligrafi dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, pada pesantren putri yang memiliki santri perempuan, mereka juga dididik, dibimbing, dibina, dan dilatih pekerjaan yang bersifat *masculine*, seperti segala bentuk olah raga (basket, voli, lari, atletik), berwiraswasta, bertukang, keamanan, bela diri, mengelola kehidupan sendiri, *leadership*, dan sebagainya. Pola pendidikan seperti ini yang penulis sebut dengan pola pendidikan berbasis gender.

Kata “gender” berasal dari bahasa Inggris “*gender*”, dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, berarti “jenis kelamin”. (John M. Echols dan Hassan Shadily: 1983). Sedangkan dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”. (Victoria Neufeldt (Ed.), 1984). Sedangkan pengertian gender menurut Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagaimana juga yang tertuang dalam Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 2000, sebagai berikut: Gender (asal kata *gen*); perbedaan peran, tugas, fungsi, dan tanggung-jawab serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan karena dibentuk oleh tata nilai sosial budaya (konstruksi

sosial) yang dapat diubah dan berubah sesuai kebutuhan atau perubahan zaman (menurut waktu dan ruang). Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung-jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender adalah pembagian peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat, sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan perubahan zaman (Setda Kota Medan, 2000). Gender bukanlah kodrat dan ketentuan Tuhan. Oleh karena itu gender berkaitan dengan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur oleh ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan kata lain, gender adalah perbedaan peran dan tanggung-jawab antar perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial budaya masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, gender bukanlah seks atau jenis kelamin, akan tetapi gender merupakan peran, fungsi, tanggung jawab serta kesempatan yang dibentuk oleh tatanan nilai sosial budaya yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Contohnya saja, pada zaman dahulu khususnya di Minangkabau peran perempuan hanya dapat dilakukan pada tiga tempat di sumur, dapur dan kasur. Hal tersebut dapat dimaklumi karena adanya anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah secara fisik dan emosi, oleh sebab itu pekerjaan yang bisa dilakukan adalah pekerjaan rumahan, mencuci memasak, menyapu rumah, mengasuh anak dan sebagainya. Sedang pekerjaan berat seperti mencangkul, ke sawah, ke kebun, mencari nafkah, bertukang, merupakan pekerjaan pria.

Gender oleh sebagian kalangan ada sebagai akibat dari konstruksi sosial yang tidak dimiliki sejak lahir. Bisa dibentuk, diubah dan dipengaruhi sesuai dengan waktu, tempat, suku, budaya, status sosial, ekonomi, politik, dan pemahaman agama. Contohnya saja zaman sekarang, di tengah permasalahan hidup semakin kompleks, kebutuhan hidup semakin meningkat, dalam kehidupan rumah tangga ayah tidak mencukupi lagi untuk mencari nafkah sendiri. Akibatnya ibu atau istri harus keluar dari rumah untuk membantu mencari

nafkah, karena apabila itu tidak dilakukan maka kebutuhan rumah tangga tidak akan tercukupi. Oleh sebab itu gender bersifat relatif sesuai dengan kondisi dan situasi. Gender juga bukan kodrat seperti halnya kelamin yang tidak bisa diganti dan diubah.

Seperti telah dikemukakan di atas, Islam pun memiliki konsep dan prinsip yang jelas berkenaan dengan gender. Walaupun masih terdapat kontroversi mengenai gender, akan tetapi sebagian kalangan atau ulama Islam telah menerima dan memahami tentang gender sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Muhammad Aunul Abide Shah mengemukakan bahwa adanya yang kontra tentang gender dikalangan Islam dikarenakan pada periode awal para ulama fiqih ” langkah “ dalam menafsirkan ayat-ayat gender dalam al Quran, sehingga mereka memahaminya secara literal. Seperti ayat al-Quran “*al-Rijaal qawwaamuu ‘alaa al-nisaa’*” dengan alasan bahwa wanita memiliki satu persen akal dan 99 persen emosi. Oleh sebab itu pekerjaan yang berat tidak bisa diberikan pada wanita, karena wanita bersifat emosional. Begitu juga pemahaman terhadap adanya surah an-Nisa’ yang pemahamannya lebih ditujukan pada wanita, sehingga aturan-aturan yang dikemukakan dalam surah itu lebih ditekankan pada wanita, padahal aturan tentang berumah tangga dalam surah tersebut ditujukan pada laki-laki dan perempuan (Muhammad Aunul Shah, 2001: 235-236).

Islam, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat al-Quran mengemukakan dan mengakui adanya kesetaraan gender. Antara lain mengemukakan prinsip Islam bahwa secara peran, antara laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan seperti sama-sama memiliki kedudukan sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi (QS. Az Zariat: 56 dan al-‘Anam: 165) sebagai orang yang menerima perjanjian/ sama-sama berikrar akan keberadaan Allah (al-A’raaf 172) sebagai hamba yang punya tanggung jawab (al-Baqarah: 35), dan sebagai yang berpotensi meraih sesuatu atau prestasi (Ali Imran: 195) (Nasaruddin Umar: 2001).

Ayat-ayat tersebut di atas mengisyaratkan konsep kesadaran gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi

individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Salah satu “obsesi” al-Quran ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam al-Quran mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu al-Quran tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan.

Uraian dan dalil di atas, menambah keyakinan bahwa Islam juga memiliki konsep kesetaraan gender asalkan tidak menyalahi aturan agama. Seperti untuk istri yang juga membantu suaminya dalam mencari nafkah, jangan karena memiliki penghasilan sendiri bahkan lebih besar dari suami, bersikap merendahkan dan meremehkan suami. Bagaimana pun suami merupakan kepala rumah tangga yang wajib dihormati, disayangi, dan dilayani oleh istri dengan baik. Pemahaman tentang Nilai-nilai kesetaraan gender perspektif Islam harus dipahami, dikembangkan, dan ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari di segala bidang.

Pendidikan sebagai salah satu media yang berfungsi dalam menanamkan nilai-nilai agamis dan positif di tengah-tengah masyarakat pada generasi penerus, memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar agar nilai-nilai tersebut salah dipahami dan diamalkan oleh manusia. Sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki bentuk pembinaan dan pengajaran berbasis gender.

Nilai kemandirian yang terdapat dalam pendidikan, pengajaran dan pembinaan di pesantren, dilihat merupakan pendidikan kemandirian berbasis gender. contohnya, santriwati dan santri mereka dibina dan dididik melakukan peran sebagaimana orang yang hidup di

asrama dan terpisah dari keluarga. Jadi, bukan hal yang mustahil santri melakukan pekerjaan memasak, mencuci, mengatur keuangan dan sebagainya yang sebagian orang berpendapat semua itu adalah pekerjaan wanita. Begitu juga dengan santriwati, mereka harus mengerjakan pekerjaan *masculine* seperti bertukang, berwiraswasta, berolah raga keras, latihan bela diri, dan sebagainya. Berdasarkan uraian sebelumnya terbukti bahwa situasi kondisi mereka yang hidup merantau membuat mereka harus melakukan pekerjaan dan perbuatan yang sebagian orang tidak pantas dilakukan sesuai dengan jenis kelamin mereka.

### **E. Penutup**

Berdasarkan paparan di atas mengenai pendidikan kemandirian berbasis gender pada pesantren di Indonesia, dikemukakan bahwa nilai-nilai kemandirian perlu ditanamkan dalam system pendidikan di Indonesia. Gender bukanlah sebuah kodrat, bawaan lahir, dan jenis kelamin yang tidak dapat berubah dan diatur. Gender adalah penyesuaian peran, tanggung jawab, dan kegiatan berdasarkan situasi kondisi, ekonomi politik, pemahaman agama, budaya, adat, geografi, suku dan sebagainya. Fungsi adanya kesetaraan gender dalam kehidupan manusia adalah, adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran, tanggung jawab, kegiatan sepanjang hal tersebut positif, sesuai dengan sosial budaya, pemenuhan kebutuhan, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia, memiliki fungsi dan tanggung jawab yang sama sebagaimana lembaga pendidikan lainnya, yaitu menanamkan dan menginternalisasi nilai-nilai positif dan agamis pada masyarakat, salah satunya adalah nilai kemandirian berbasis gender. Kemandirian merupakan nilai-nilai mutlak yang harus dimiliki santri dan santriwati di semua pesantren di Indonesia. Kemandirian tidak akan terlaksana dengan baik apabila masih kaku dan tumbang pilih dalam memahami pekerjaan bersifat *feminine* dan *masculine*, karena pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang santrinya hidup terpisah dari keluarga, di asrama,

tidak boleh bercampur dengan santriwati, mereka harus mandiri secara keseluruhan agar survival hidup di pesantren. Nilai kemandirian berbasis gender juga menjadikan lulusan pesantren mampu hidup dalam kondisi dan situasi apapun.

## **F. Referensi**

- Ali, A. Mukti. 1987. *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Daradjat, Zakiah. 1996. *Islam dan Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung.
- Depag RI. 2004. *Bina Pesantren Kajian dan Warta Kepesantrenan*. Edisi (2), Proyek Peningkatan Pondok Pesantren Depag RI berkerjasama dengan P3M. Jakarta.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Fahrurrozi, Azis dan Erta Mahyudin. 2010. *Fiqh Manajerial: Aplikasi Nilai-nilai Ibadah dalam Kehidupan*. Jakarta: Pustaka al-Mawardi.
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartasasmita, Ginandjar. "Reaktualisasi Nilai-nilai Kepesantrenan" dalam [www. Ginandjar.com](http://www.ginandjar.com).
- Madjid, Nurcholiz. 2010. *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan*. Jakarta: Paramadina.
- Mas'ud, Abdurrahman. 2002. "Sejarah dan Budaya Pesantren" dalam Ismail SM. ed. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nasir, Ridwan. 2005. *Mencarari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurcholis. 2005. *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, model dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Patoni, Achmad. 2007. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Qomar, Mujamil. *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sidi, Indra Jati. 2001. "Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan" dalam *Jurnal Studi Pembangunan, Kemasyarakatan dan lingkungan*. Vol. 3. No. 1.
- Syukur, Fatah. 2008. "Sistem Nilai dalam Budaya Organisasi Pendidikan di Pesantren". dalam *Jurnal Penelitian Walisongo*. Volume XVI. Nomor 2. November.
- Smart, Mollier and Russel C. Smart. *Adolecent development and relationship*. New York: macmillah Publishing CO. Inc. 2 Edition.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Writing Arabic*. Beirut: Libraire du Liban
- Zarkasyi, Abdullah Syukri. 2005. *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2011. "Menggagas Pendidikan Berkarakter Ala Gontor" dalam *Gontor*. Edisi 03 Tahun IX Juli.
- Shah, M. Aunul Abied Shah *et.al*. 2001. *Islam Garda depan Mosaik Pemikiran Islam Timur tengah*. Bandung: Mizan.